

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O. C. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyelidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Kansil, C. S. T. (1968). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartayasa, M. (2017). *Korupsi & Pembuktian Terbalik*. Jakarta: Kencana.
- Khudzaifah, D. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, A. (2015). *Korupsi di Indonesia : Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (1990). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Lubis, M., & Scott, J. C. (1995). *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (1987). *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosiyad Karya.
- Poernomo, B. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prajogo, S. (2007). *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Wacana

Intelektual.

- Rama k., T. (2010). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Rodliyah, & H.S., S. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur & Sanksi Pidananya)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarmida, Zurnetti, A., & Suryani, N. (2002). *Diklat Hukum Pidana*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2005). *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- UMS, T. M. L. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Sukoharjo: CV. Jasmine.
- Wahjono, P. (1993). *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjajanto, A., & Wardhani, A. (2008). *Hubungan Intelejen-Negara 1945-2004*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Wiyono. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S. (1999). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Wojowasito, S., & Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Bandung: Hasta.
- Zainal, A., M. Said, K., & Slamet, S. S. (2013). Implementasi Kewenangan Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2 No.3*.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Anwary, S. 2001, *Penegakan Negara Hukum di Republik Indonesia*, (<http://www.isepsamra.or.id/penegakan%20supermasi%20hukum%20di%20RI.doc>), diakses Senin 26 Agustus 2019 Pukul 22.40

Wikipedia, 2019, *Kejaksaan republik Indonesia* dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Istimewa:History/Kejaksaan_Rapublik_Indonesia diakses Rabu 12 Februari 2020, Pukul 21.05